

The Effectiveness of the Implementation of the Marine and Fisheries Business Actor Card (Kusuka) Program for Fisherman in Anaiwoi Village

Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) bagi Nelayan di Kelurahan Anaiwoi

Rahmi, Nursamsir, Nimrah Rahmayanti Yusuf A.*

*nimrary@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka – Indonesia

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the Fishermen and Fisheries Business Actor Card (KUSUKA) program implemented by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of Indonesia in Anaiwoi Village. The program aims to improve fishermen's welfare by providing a unified identity for marine and fisheries business actors. Using Campbell's program effectiveness indicators, this descriptive qualitative research employed observations, interviews, and documentation, with data analysis following the steps of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings indicate that the program has achieved partial success. Outreach activities have reached most fishermen, yet information dissemination remains uneven. Target achievement shows that while many active fishermen have been registered, administrative understanding and data collection challenges persist. Beneficiaries' satisfaction is relatively good as the program helps in legalizing fishing businesses; however, complicated assistance procedures and uneven aid distribution limit its perceived benefits. Regarding input-output efficiency, active data collection and local authority involvement have contributed positively, but limitations in staff, facilities, infrastructure, and budget continue to hinder full implementation. Overall, the KUSUKA program has improved fishermen's access to administrative services and created a more structured database of fisheries business actors. Nevertheless, it has not fully achieved its objectives. Strengthening outreach, streamlining data collection, simplifying administrative processes, and improving resource allocation are essential for optimizing the program's future impact.

Keywords: *Effectiveness, Implementation, KUSUKA Program, Public Policy*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Kelurahan Anaiwoi. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menyediakan identitas tunggal bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dengan menggunakan indikator efektivitas program dari Campbell, penelitian kualitatif deskriptif ini memanfaatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini baru mencapai sebagian keberhasilan. Kegiatan sosialisasi telah menjangkau sebagian besar nelayan, tetapi penyebaran informasi masih belum merata. Pencapaian sasaran menunjukkan banyak nelayan aktif yang sudah terdata, namun

pemahaman administrasi dan kendala pendataan masih menjadi hambatan. Kepuasan penerima manfaat dinilai cukup baik karena program membantu legalisasi usaha perikanan; namun prosedur bantuan yang rumit dan distribusi bantuan yang belum merata mengurangi manfaat yang dirasakan. Dari segi efisiensi input-output, pendataan aktif dan keterlibatan pemerintah daerah memberi dampak positif, tetapi keterbatasan tenaga, sarana, prasarana, dan anggaran menghambat implementasi penuh. Secara keseluruhan, Program KUSUKA telah meningkatkan akses nelayan terhadap layanan administrasi dan menciptakan basis data pelaku usaha perikanan yang lebih terstruktur. Namun, penguatan sosialisasi, penyederhanaan pendataan, perbaikan proses administrasi, dan dukungan sumber daya masih diperlukan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Program KUSUKA, Kebijakan Publik

Pendahuluan

Secara garis geografis Indonesia memiliki dua pertiga luas lautan daripada luas daratan. Karena memiliki wilayah lautan yang luas, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya laut (Munawan et al., 2021). Menurut (Tuharea, 2015), luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5.8 juta Km² dengan garis pantai terpanjang di dunia 81.00 Km² setelah Kanada dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508 memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6.26 juta ton pertahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4.4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1.86 ton dapat di peroleh di perairan ZEE.

Besarnya nilai sektor perikanan di Indonesia tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan pesisir. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir identik dengan masyarakat miskin (Silooy, 2017; Wasiaturrahma et al., 2020). Hal ini sejalan dengan persepsi masyarakat lainnya yang banyak menghubungkan nelayan dengan kehidupan yang susah, dan serba kekurangan terutama dalam ekonominya yang tergolong rendah. Berdasarkan informasi dari KNTI (2020) meskipun peran yang dimiliki cukup penting, namun dengan kondisi kehidupan nelayan dan keluarganya, lebih dari 2 juta nelayan di Indonesia turut menyumbang 25% angka kemiskinan nasional. Hal ini dikarenakan mayoritas nelayan di Indonesia merupakan nelayan berskala kecil yang hidup diambang garis kemiskinan (Triyanti & Firdaus, 2016; Arif, 2022).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pada tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang disingkat Kartu KUSUKA. Penerbitan Kartu KUSUKA merupakan bagian dari Satu Data Kelautan dan Perikanan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet tentang rancangan Instruksi Presiden (Inpres) sinkronisasi perencanaan dan pembangunan nasional. Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan (KUSUKA) Adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dasar Hukum Pelaksanaan KUSUKA Adalah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 39/Permen-Kp/2017 tentang kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Adapun fungsi kartu kusuka antara lain: identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan, basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan perikanan, pelayanan dan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian. Program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) pertama kali di jalankan di kelurahan anaiwoi sejak tahun 2018 sampai sekarang melalui dinas kelautan dan perikanan kabupaten kolaka. Berdasarkan data awal yang di peroleh penulis di Kelurahan Anaiwoi pada tahun 2024 jumlah penduduk 3,426 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1725 jiwa dan perempuan 1701 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 947, yang tersebar kedalam 1 kelurahan selanjutnya Terdapat 89 orang yang berprofesi di bidang perikanan seperti nelayan, pemasar ikan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang memiliki kartu kusuka. 62 di antaranya berprofesi sebagai nelayan.

Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Kolaka sebagai lembaga berwenang yang di tunjuk untuk menjalankan dan merealisasikan program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun dalam pelaksanaan kartu KUSUKA tidak terlepas dari permasalahan, yakni masih banyak masyarakat nelayan yang tidak tau cara mengakses bantuan kusuka. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh bapak gala selaku pemilik salah satu kartu kusuka di kelurahan anaiwoi lewat wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa beberapa masyarakat nelayan yang belum mendapatkan informasi lengkap tentang manfaat, persyaratan, dan

prosedur pengurusan KUSUKA karena minimnya kegiatan sosialisasi dari instansi terkait. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kelurahan Anaiwoi.

Metode

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah pelaksanaan program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bagi nelayan di Kelurahan Anaiwoi. Mengukur efektivitas program KUSUKA dengan menggunakan indikator pengukuran efektivitas program yang dikemukakan oleh Campbell (Sari et al., 2023). Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengacu pada metodologi yang digunakan untuk memahami fenomena manusia dari perspektif yang dalam, kompleks, dan kontekstual (Niam et al., 2024). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus FGD (*Focus Grup Discussion*) (Sugarda, 2020) dan penyebaran kuesioner. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Sodik & Sioto, 2015). Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan Menurut (Nurdin & Hartati, 2019), sebagai berikut : (1) Observasi Atau Pengamatan adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, penggunaan observasi dalam pengumpulan data penelitian dirasakan sangat penting. (2) Wawancara Atau Interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. (3) Dokumentasi merupakan ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, data yang relevan penelitian. Teknik analisis data mengikuti model yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Annisa & Kartini, 2021).

Hasil Dan Pembahasan

Untuk mengukur efektivitas program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bagi nelayan di kelurahan anaiwoi, peneliti menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam Shalehah et al., 2025 yang memuat lima indikator pengukuran yang saling berhubungan satu sama lain yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Menurut Campbell J.P. (1999), keberhasilan program dapat dilihat dari kemampuan operasional pelaksana dalam mengatur, mengelola, dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga dapat dinilai dari kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan pedoman program, serta adanya ketercapaian dalam setiap tahapan proses yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, keberhasilan program dapat ditinjau dari proses sosialisasi, pelaksanaan pendataan, serta pelayanan administrasi penerbitan kartu KUSUKA. Program ini bertujuan untuk memberikan legalitas usaha bagi pelaku usaha perikanan dan mempermudah akses mereka terhadap berbagai program pemberdayaan dan bantuan dari pemerintah.

Program ini mulai dilaksanakan secara aktif sejak tahun 2018 dan terus berjalan hingga saat ini. Tahapan awal pelaksanaan program diawali dengan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi wilayah permukiman nelayan, mengadakan pertemuan kelompok, serta memanfaatkan fasilitas pertemuan yang tersedia di kelurahan. Sosialisasi menjadi sarana untuk menyampaikan informasi tentang tujuan program, prosedur pendaftaran, persyaratan administrasi, serta manfaat dari kepemilikan kartu KUSUKA bagi pelaku usaha perikanan. Pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan secara langsung di tengah masyarakat, khususnya di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh

nelayan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada sore hari, setelah nelayan kembali dari aktivitas melaut. Hal ini dipilih agar pelaksanaan sosialisasi tidak mengganggu aktivitas kerja nelayan. Kegiatan ini mendapat respon yang cukup baik karena nelayan dapat memperoleh informasi secara langsung, berdiskusi, serta menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam mengikuti program. Setelah tahap sosialisasi, pelaksanaan pendataan dilakukan dengan metode jemput bola, yaitu penyuluh mendatangi langsung rumah-rumah nelayan untuk melakukan pendataan. Pendataan ini mencakup identitas pelaku usaha perikanan, jenis usaha yang dijalankan, serta kelengkapan dokumen administrasi yang diperlukan. Langkah ini ditempuh untuk memudahkan pelaku usaha perikanan yang kesulitan datang ke kantor kelurahan atau Dinas Kelautan dan Perikanan karena kesibukan melaut. Proses pendataan berjalan cukup lancar, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala. Beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen. Kondisi ini menyebabkan beberapa data calon penerima belum dapat diproses lebih lanjut. Selain itu, terbatasnya jumlah tenaga penyuluh di Kelurahan Anaiwoi juga berdampak pada lamanya proses pendataan di lapangan. Pelaksanaan program ini menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menjangkau sebagian besar masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Capaian pendataan pelaku usaha perikanan telah mencapai sekitar 80%, meskipun belum seluruhnya memperoleh kartu secara fisik. Program ini berhasil memberikan legalitas usaha bagi pelaku usaha perikanan yang telah terdata, sehingga memudahkan mereka dalam mengikuti program-program bantuan alat tangkap, pelatihan usaha, dan akses permodalan di sektor perikanan.

Program KUSUKA di Kelurahan Anaiwoi juga berhasil menciptakan sistem pendataan pelaku usaha perikanan yang lebih tertib dan terstruktur. Sebelumnya, data pelaku usaha perikanan tersebar di beberapa instansi tanpa keseragaman, sehingga menyulitkan dalam proses verifikasi penerima bantuan. Dengan adanya program ini, data pelaku usaha perikanan di wilayah tersebut menjadi lebih jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pemerintah daerah. Meskipun pelaksanaan program berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang menjadi catatan. Salah satunya adalah pemerataan informasi kepada seluruh masyarakat nelayan. Masih terdapat pelaku usaha perikanan yang belum sepenuhnya memahami prosedur pendaftaran dan manfaat program. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya waktu pelaksanaan sosialisasi dan jumlah tenaga penyuluh yang belum sebanding dengan jumlah pelaku usaha perikanan di wilayah tersebut. Selain itu, keterbatasan fasilitas penunjang seperti komputer, printer, dan jaringan internet di kelurahan juga menghambat proses input data dan pencetakan kartu. Proses cetak kartu yang harus dilakukan di kantor dinas menyebabkan waktu penerbitan kartu menjadi lebih lama dari yang direncanakan. Beberapa pelaku usaha perikanan menyatakan bahwa setelah data mereka terinput, kartu baru dapat diterima beberapa minggu kemudian.

Secara umum, pelaksanaan Program KUSUKA di Kelurahan Anaiwoi dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari capaian pelaksanaan program yang telah menjangkau sebagian besar pelaku usaha perikanan, pelaksanaan sosialisasi yang berjalan baik, serta adanya proses pendataan yang aktif meskipun bertahap. Program ini memberikan dampak positif bagi pelaku usaha perikanan karena membantu mereka dalam memperoleh legalitas usaha yang resmi. Program ini juga berhasil membangun kesadaran pelaku usaha perikanan terhadap pentingnya memiliki identitas usaha resmi dari pemerintah. Sebelumnya, banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dan tidak tercatat dalam data pemerintah. Melalui program ini, mereka mulai memahami pentingnya legalitas usaha, baik untuk kepentingan akses bantuan, pengajuan proposal kelompok, maupun perizinan usaha. Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di jelaskan bahwa Pelaksanaan Program KUSUKA di Kelurahan Anaiwoi dari aspek keberhasilan program dapat dikatakan cukup berhasil. Pelaksanaan sosialisasi telah menjangkau sebagian besar nelayan sesuai kriteria, meskipun masih terdapat kendala dalam pemerataan informasi akibat keterbatasan tenaga pelaksana dan aktivitas nelayan yang tidak menentu.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran dalam suatu program publik merupakan indikator yang menunjukkan seberapa jauh target penerima program telah dicapai sesuai dengan rencana awal. Campbell J.P. (1999) menjelaskan bahwa keberhasilan sasaran dapat dilihat dari tingkat ketercapaian jumlah sasaran penerima manfaat dan ketepatan sasaran program. Program dianggap efektif apabila sasaran program tercapai secara proporsional dan sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) di Kelurahan Anaiwoi menetapkan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai sasaran utama. Sasaran tersebut meliputi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, serta pelaku jasa pengangkutan hasil tangkap. Sasaran

program ini difokuskan kepada pelaku usaha perikanan aktif yang belum memiliki legalitas usaha, dan diprioritaskan bagi yang belum pernah menerima kartu KUSUKA.

Pencapaian sasaran program dilaksanakan melalui kegiatan pendataan pelaku usaha perikanan di wilayah Kelurahan Anaiwoi. Pendataan dilakukan secara langsung untuk memastikan validitas data dan mencegah adanya data ganda. Proses pendataan juga mencakup verifikasi administrasi agar penerima kartu benar-benar sesuai kriteria. Prosedur ini dijalankan untuk menjaga akurasi data sasaran program, sekaligus menjadi dasar dalam proses penerbitan kartu dan pemberian program bantuan di bidang kelautan dan perikanan. Program KUSUKA di wilayah ini menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun belum optimal. Jumlah pelaku usaha perikanan yang telah terdata mencapai angka yang signifikan, dan sebagian besar di antaranya telah memperoleh kartu. Namun, belum seluruhnya penerima manfaat terlayani karena berbagai faktor. Sebagian pelaku usaha belum mendaftar atau belum menyelesaikan dokumen administrasi yang menjadi syarat penerbitan kartu.

Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program menjadi perhatian penting karena menyangkut akurasi penerima manfaat yang berhak. Pendataan yang dilakukan secara langsung bertujuan agar penerima kartu benar-benar pelaku usaha perikanan aktif, bukan pihak di luar sektor tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan dan program turunan yang berbasis data KUSUKA nantinya tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Capaian terhadap keberhasilan sasaran program ini juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti partisipasi pelaku usaha dalam mengikuti proses pendataan, serta kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. Pelaku usaha perikanan yang aktif dan memiliki kelengkapan dokumen lebih cepat terakomodasi dalam program, sementara yang masih terkendala administrasi mengalami penundaan. Selain itu, jumlah tenaga pelaksana yang terbatas menyebabkan pendataan belum sepenuhnya merata.

Upaya pendataan terus berjalan, namun dengan kondisi geografis serta kesibukan pelaku usaha yang tinggi, proses ini memerlukan waktu bertahap. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha belum terdata atau belum memperoleh kartu dalam waktu yang bersamaan. Ketepatan pencapaian sasaran dapat dilihat dari perbandingan jumlah pelaku usaha yang terdata dengan jumlah pelaku usaha aktif di wilayah tersebut. Program ini telah berhasil menjangkau sebagian besar sasaran utama, khususnya pelaku usaha yang telah melengkapi dokumen administrasi. Sebaliknya, program masih menemui kendala dalam menjangkau pelaku usaha yang kurang aktif atau belum memahami pentingnya legalitas usaha melalui program ini. Walaupun demikian, pelaksanaan program KUSUKA tetap memberi dampak positif dalam pengelolaan data pelaku usaha perikanan di wilayah Kelurahan Anaiwoi.

Program ini membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pendataan pelaku usaha perikanan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program pemberdayaan dan bantuan ke depan. Keberhasilan sasaran dalam pelaksanaan program KUSUKA ini dapat dioptimalkan melalui penyederhanaan persyaratan administrasi bagi pelaku usaha kecil, peningkatan sosialisasi, serta penambahan tenaga pelaksana untuk mempercepat proses pendataan. Selain itu, perlu adanya strategi khusus untuk menjangkau pelaku usaha yang tinggal di daerah pesisir jauh atau yang aktivitas melautnya tinggi. Dengan pelaksanaan yang lebih terstruktur, program KUSUKA diharapkan dapat menjangkau seluruh sasaran sesuai kriteria dan menciptakan data base pelaku usaha perikanan yang lengkap dan valid. Data ini sangat penting untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di tingkat daerah maupun nasional.

Berdasarkan hasil uraian di atas Pelaksanaan Program KUSUKA di Kelurahan Anaiwoi dari aspek keberhasilan sasaran dapat dikategorikan cukup berhasil, karena sebagian besar pelaku usaha perikanan telah terdata dan sebagian telah menerima kartu, meskipun masih terdapat kendala dalam pemerataan penerima manfaat akibat keterbatasan tenaga pelaksana dan partisipasi pelaku usaha yang belum maksimal.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan suatu program publik. Menurut Campbell J.P. (1999), kepuasan terhadap program dapat diukur dari seberapa jauh penerima manfaat merasa puas atas hasil dan layanan program yang diterimanya. Aspek ini menjadi penting karena pelaksanaan sebuah program pemerintah tidak hanya berorientasi pada capaian output administrasi, tetapi juga pada persepsi positif masyarakat penerima manfaat terhadap pelaksanaan program yang dijalankan.

Dalam pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) di

Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, aspek kepuasan masyarakat nelayan terhadap program menjadi bagian yang turut menentukan keberhasilan program secara keseluruhan. Program ini memberikan legalitas usaha perikanan, sekaligus memudahkan akses pelaku usaha perikanan terhadap berbagai program bantuan, pendampingan, dan pelayanan yang disediakan pemerintah. Kepuasan masyarakat nelayan terhadap pelaksanaan program di wilayah ini dapat ditinjau dari beberapa hal. Pertama, penerimaan masyarakat terhadap program KUSUKA terlihat cukup baik. Pelaku usaha perikanan yang telah mengikuti pendataan dan memperoleh kartu menyatakan merasa terbantu karena adanya kemudahan dalam pengurusan administrasi usaha, pengajuan proposal bantuan kelompok, serta keperluan lain yang berkaitan dengan legalitas usaha perikanan. Pelayanan program dinilai cukup baik karena penyuluh aktif memberikan penjelasan langsung kepada nelayan terkait prosedur pendaftaran dan manfaat program. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung di permukiman nelayan, pada waktu-waktu yang menyesuaikan aktivitas melaut. Pelayanan ini memberi kenyamanan bagi nelayan, sebab mereka dapat memperoleh informasi tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama mereka.

Selain itu, penerapan sistem jemput bola dalam pendataan menjadi faktor lain yang menumbuhkan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Pelaku usaha yang belum sempat datang ke kantor kelurahan atau ke dinas terkait tetap dapat terdata dengan baik karena penyuluh mendatangi langsung rumah mereka. Cara ini memudahkan pelaku usaha perikanan, khususnya mereka yang tinggal di pesisir atau memiliki jadwal melaut yang padat. Kepuasan masyarakat juga tampak dari kemudahan yang dirasakan dalam memperoleh legalitas usaha perikanan. Sebelum adanya program KUSUKA, banyak pelaku usaha perikanan yang kesulitan dalam urusan administrasi karena tidak memiliki kartu identitas pelaku usaha perikanan. Dengan adanya program ini, pelaku usaha perikanan merasa lebih diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga mereka lebih percaya diri saat mengurus berbagai administrasi usaha. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat nelayan. Salah satu keluhan yang muncul adalah keterlambatan dalam pencetakan dan distribusi kartu KUSUKA. Meskipun proses pendataan telah dilakukan, beberapa pelaku usaha perikanan belum memperoleh kartu secara fisik karena proses pencetakan yang memerlukan waktu lama. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana di kelurahan, seperti alat cetak dan jaringan internet yang kurang memadai.

Keterbatasan jumlah tenaga pelaksana program juga menjadi salah satu penyebab pelayanan belum berjalan maksimal. Pelaksanaan program di Kelurahan Anaiwoi hanya ditangani oleh satu orang penyuluh, sehingga pelayanan kepada pelaku usaha perikanan belum sepenuhnya merata. Masih ada pelaku usaha yang belum didatangi penyuluh secara langsung, atau belum mendapatkan informasi lengkap mengenai manfaat program. Di samping itu, masih terdapat sebagian pelaku usaha perikanan yang belum memahami sepenuhnya manfaat program KUSUKA. Beberapa di antaranya menganggap bahwa program ini hanya sebatas administrasi biasa tanpa manfaat langsung. Kondisi ini terjadi karena sebagian pelaku usaha belum pernah menerima bantuan alat tangkap atau program pemberdayaan setelah memiliki kartu, sehingga mereka belum merasakan manfaat nyata secara langsung.

Meski demikian, secara umum, pelaksanaan program ini telah memberikan manfaat positif bagi pelaku usaha perikanan yang telah terdata dan menerima kartu KUSUKA. Pelaku usaha perikanan tersebut mengaku merasa lebih mudah dalam pengurusan administrasi, pengajuan bantuan, serta dalam pengurusan proposal kelompok usaha. Program ini juga dinilai cukup berhasil membangun kesadaran pelaku usaha perikanan tentang pentingnya memiliki legalitas usaha. Sebelumnya, banyak pelaku usaha yang tidak memahami pentingnya administrasi usaha dan legalitas formal. Sejak adanya program KUSUKA, kesadaran masyarakat tentang hal ini mulai meningkat, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi lanjutan. Pelaksanaan program ini pun berhasil menciptakan basis data pelaku usaha perikanan yang lebih tertib dan terstruktur di Kelurahan Anaiwoi. Hal ini memudahkan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan dan program pemberdayaan, meskipun perlu diakui bahwa pemerataan distribusi manfaat program masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Berdasarkan uraian di atas Pelaksanaan Program KUSUKA di Kelurahan Anaiwoi dari aspek kepuasan masyarakat terhadap program dapat dikategorikan cukup baik, karena sebagian besar pelaku usaha perikanan merasa terbantu dan puas terhadap pelayanan program, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti keterlambatan pencetakan kartu dan belum meratanya distribusi manfaat program.

4. Tingkat Input dan Output

Dalam menilai efektivitas pelaksanaan suatu program, variabel tingkat input dan output menjadi bagian penting yang menunjukkan hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Menurut Campbell J.P. (1999), input dalam sebuah program meliputi semua sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, baik berupa tenaga pelaksana, sarana dan prasarana, waktu, maupun anggaran. Sedangkan output adalah hasil langsung yang dihasilkan dari proses pelaksanaan program tersebut, seperti produk layanan, data yang diperoleh, atau dokumen yang dihasilkan.

Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka menggunakan beberapa komponen input, di antaranya tenaga penyuluh perikanan, aparat kelurahan, fasilitas peralatan administrasi, serta anggaran pendukung kegiatan. Tenaga pelaksana yang terlibat di lapangan terdiri atas penyuluh perikanan yang bertugas melakukan pendataan, sosialisasi, dan pelayanan administrasi program, dibantu oleh perangkat kelurahan dalam pelaksanaan sosialisasi serta pengumpulan berkas administrasi calon penerima kartu. Keterbatasan jumlah tenaga pelaksana menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program di wilayah ini. Hanya terdapat satu orang penyuluh yang bertanggung jawab untuk mendata seluruh pelaku usaha perikanan di Kelurahan Anaiwoi, sementara jumlah nelayan di wilayah tersebut cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan proses pendataan berlangsung secara bertahap dan memerlukan waktu lebih panjang untuk mencapai seluruh sasaran. Selain itu, aktivitas nelayan yang tidak menentu juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses pendataan.

Dari aspek fasilitas, pelaksanaan program di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan sarana penunjang seperti komputer, printer, dan jaringan internet di kantor kelurahan. Proses input data dan pencetakan kartu KUSUKA sebagian besar dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam proses penerbitan kartu. Keterbatasan fasilitas ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan layanan program di tingkat kelurahan. Anggaran pelaksanaan program di wilayah ini bersumber dari alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi, pendataan, pengadaan alat cetak kartu, serta biaya operasional lainnya. Meskipun demikian, anggaran yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana di lapangan.

Dari segi output, pelaksanaan program ini telah menghasilkan sejumlah capaian yang cukup baik. Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan secara langsung di lokasi permukiman nelayan, di balai pertemuan kelurahan, maupun melalui sistem jemput bola. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang manfaat program, prosedur pendaftaran, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Pelaksanaan sosialisasi ini berhasil menjangkau sebagian besar pelaku usaha perikanan di wilayah Kelurahan Anaiwoi.

Selain itu, output lain yang dihasilkan dari program ini adalah pendataan pelaku usaha perikanan di wilayah Kelurahan Anaiwoi yang lebih tertib dan terstruktur. Melalui program ini, telah tercipta data base pelaku usaha perikanan yang valid dan akurat, yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam perencanaan program pemberdayaan dan bantuan di sektor kelautan dan perikanan. Program ini juga telah menghasilkan output berupa penerbitan kartu KUSUKA kepada pelaku usaha perikanan yang telah memenuhi syarat administrasi. Meskipun masih terdapat pelaku usaha yang belum menerima kartu akibat proses pencetakan yang tertunda, sebagian besar pelaku usaha perikanan yang telah terdata telah memperoleh kartu KUSUKA. Penerbitan kartu ini memberikan legalitas resmi kepada pelaku usaha perikanan, serta memudahkan mereka dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah.

Namun demikian, ketidakseimbangan antara jumlah input yang tersedia dengan target output program masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini. Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas, fasilitas pendukung yang minim, serta anggaran yang terbatas menyebabkan proses pelayanan dan pencapaian output program belum berjalan optimal. Proses pencetakan kartu memerlukan waktu lama karena keterbatasan alat cetak dan jaringan internet. Selain itu, pelaksanaan pendataan masih berlangsung secara bertahap karena keterbatasan waktu dan tenaga pelaksana. Meskipun terdapat kendala, pelaksanaan program KUSUKA di Kelurahan Anaiwoi tetap mampu menghasilkan capaian yang cukup baik. Pendataan pelaku usaha perikanan berjalan aktif, sosialisasi terlaksana dengan baik, dan penerbitan kartu telah dilakukan secara bertahap. Program ini juga berhasil meningkatkan

kesadaran pelaku usaha perikanan terhadap pentingnya legalitas usaha, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi lanjutan.

Berdasarkan hasil uraian di atas Pelaksanaan Program KUSUKA di Kelurahan Anaiwoi dari aspek tingkat input dan output dapat dikategorikan cukup baik, meskipun masih terdapat ketidakseimbangan antara jumlah input dengan output yang dihasilkan. Keterbatasan tenaga pelaksana, anggaran, dan fasilitas penunjang menjadi kendala utama, namun output program seperti pelaksanaan sosialisasi, pendataan pelaku usaha, dan penerbitan kartu telah terlaksana dengan cukup baik.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dalam teori efektivitas program menurut Campbell J.P. (1999), pencapaian tujuan menyeluruh merupakan indikator paling utama dalam menilai keberhasilan sebuah program. Pencapaian ini menunjukkan sejauh mana seluruh tujuan jangka panjang dari pelaksanaan program berhasil direalisasikan, baik dalam bentuk output langsung maupun dampak tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat sasaran. Program dikatakan efektif apabila mampu memenuhi seluruh tujuan yang telah ditetapkan sejak awal perencanaan, baik yang bersifat administratif maupun manfaat strategis bagi penerima manfaat. Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka merujuk pada lima tujuan pokok yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui pedoman Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Tujuan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan program di daerah, termasuk di Kabupaten Kolaka.

Tujuan pertama adalah meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program di wilayah ini sudah memperlihatkan peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam hal pendataan dan pengurusan legalitas usaha perikanan. Pelaku usaha lebih mudah mengurus administrasi usaha karena adanya program KUSUKA yang memberikan legalitas resmi. Penyuluhan langsung ke lapangan, sistem jemput bola, dan pelayanan administrasi di kelurahan memudahkan pelaku usaha memperoleh informasi dan mengikuti program. Namun demikian, pemerataan pelayanan masih menjadi kendala. Masih terdapat pelaku usaha yang belum terjangkau oleh pendataan karena keterbatasan tenaga pelaksana dan kondisi geografis. Beberapa pelaku usaha perikanan di wilayah pesisir jauh belum terdata atau belum memperoleh kartu. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan sudah berjalan, tetapi belum merata ke seluruh masyarakat nelayan.

Tujuan kedua adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi program lintas eselon di lingkungan KKP, baik dari segi data maupun anggaran. Program KUSUKA telah berhasil membantu pemerintah daerah dalam menyusun data base pelaku usaha perikanan secara lebih tertib dan terstruktur. Sebelumnya, data pelaku usaha tersebar di beberapa instansi tanpa sistem tunggal. Melalui program ini, data pelaku usaha perikanan di Kelurahan Anaiwoi telah dihimpun dalam sistem nasional SIPUKP. Namun, efektivitas ini masih terkendala oleh beberapa faktor teknis, seperti kelengkapan data yang belum sepenuhnya valid, keterlambatan proses verifikasi, serta lambatnya pencetakan kartu akibat terbatasnya fasilitas pendukung di tingkat kelurahan. Efisiensi anggaran pun belum sepenuhnya tercapai, karena proses administrasi masih harus dilakukan secara manual dan memerlukan biaya tambahan untuk mobilisasi ke kantor dinas kabupaten. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi program sudah mulai berjalan, tetapi belum maksimal.

Tujuan ketiga adalah menjadikan program ini sebagai instrumen harmonisasi kebijakan serta standarisasi kartu yang diterbitkan KKP. Pelaksanaan program KUSUKA di Kelurahan Anaiwoi telah menerapkan standar kartu nasional yang sama dengan wilayah lain. Setiap kartu diterbitkan dengan format dan ketentuan yang seragam. Hal ini memudahkan proses verifikasi saat penyaluran bantuan dan pengajuan proposal kelompok usaha. Meskipun demikian, belum semua pelaku usaha perikanan memiliki kartu, sehingga implementasi standarisasi ini masih berjalan secara bertahap. Standarisasi kartu telah diterapkan bagi pelaku usaha yang telah terdata dan memenuhi persyaratan administrasi, sedangkan yang belum melengkapi dokumen masih dalam proses.

Tujuan keempat adalah melengkapi pendataan identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan, termasuk menghindari redundansi data. Program ini telah berhasil mengumpulkan data pelaku usaha perikanan di wilayah Kelurahan Anaiwoi. Pendataan dilakukan langsung ke lapangan dan melalui pengumpulan dokumen administrasi yang diverifikasi oleh penyuluh. Data tersebut kemudian diinput ke dalam sistem SIPUKP, sehingga pelaku usaha yang telah memiliki kartu tidak akan tercatat ganda di program-program bantuan lain. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan ini adalah proses

pendataan yang belum selesai sepenuhnya. Masih ada pelaku usaha yang belum terdata atau belum melengkapi dokumen administrasi. Selain itu, proses pembaruan data belum berjalan rutin karena terbatasnya tenaga pelaksana di lapangan. Dengan demikian, pencapaian tujuan pendataan ini baru berjalan sebagian dan masih memerlukan penyempurnaan.

Tujuan kelima adalah meningkatkan kemungkinan kerja sama dengan berbagai mitra usaha serta perbankan. Dengan adanya legalitas usaha melalui program KUSUKA, pelaku usaha perikanan diharapkan lebih mudah mengakses layanan perbankan maupun program kemitraan usaha. Di wilayah Kelurahan Anaiwoi, peluang kerja sama ini masih terbatas. Data base KUSUKA baru digunakan sebagai syarat administratif dalam pengajuan proposal bantuan kelompok nelayan di tingkat kabupaten. Belum ada kerja sama formal dengan perbankan yang memanfaatkan data KUSUKA sebagai syarat pengajuan kredit usaha. Meskipun demikian, program ini tetap membuka peluang ke arah tersebut di masa mendatang, seiring meningkatnya legalitas pelaku usaha dan ketersediaan data yang valid.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program KUSUKA di Kelurahan Anaiwoi dari aspek pencapaian tujuan menyeluruh belum sepenuhnya berjalan efektif, karena masih terdapat beberapa tujuan program yang belum sepenuhnya tercapai, seperti belum optimalnya pelayanan, belum meratanya bantuan, serta belum maksimalnya pendataan dan kerja sama lintas pihak. Dengan demikian, diperlukan penyempurnaan pelaksanaan di tingkat lapangan, peningkatan tenaga pelaksana, serta optimalisasi fasilitas pendukung agar seluruh tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) di Kelurahan Anaiwoi, dapat disimpulkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif. Beberapa indikator seperti keberhasilan program, keberhasilan sasaran, tingkat kepuasan masyarakat, tingkat input-output, serta pencapaian tujuan menyeluruh menunjukkan hasil cukup berhasil namun belum optimal. Contohnya, sosialisasi program telah menjangkau sebagian besar nelayan dan pendataan berjalan aktif, tetapi kendala seperti keterbatasan tenaga penyuluh, pemerataan informasi yang belum merata, dan keterlambatan pencetakan kartu masih terjadi. Selain itu, sebagian nelayan belum sepenuhnya merasakan manfaat nyata program karena prosedur bantuan yang rumit dan distribusi bantuan yang belum merata. Dengan demikian, pencapaian tujuan utama program dalam memberikan legalitas usaha, meningkatkan pelayanan, serta membangun basis data terpadu sudah mulai terlihat, namun memerlukan penyempurnaan agar seluruh tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Untuk meningkatkan efektivitas program KUSUKA, pemerintah perlu memperluas sosialisasi agar informasi merata, menyederhanakan proses pendataan dan distribusi kartu, serta menambah tenaga penyuluh dan fasilitas pendukung. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengevaluasi dampak program setelah perbaikan dilakukan.

Referensi

- Annisa, R., & Kartini, K. (2021). Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal barisan dan deret aritmatika menggunakan tahapan kesalahan Newman. *Jurnal Cendekia*, 5(1), 522–532. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cendekia.v5i1.506>
- Arif, L. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Bagi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*.
- Munawan, Kasim, M., & Ruslaini. (2021). *Growth rate of Eucheuma denticulatum cultivated in horizontal net and vertical net*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1088/1755-1315/925/1/012018>
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., & Fathin, S. (2024). *Metode penelitian kualitatif*.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Sari, N. P. D. A. P., Purnamaningsih, P. E., & Wijaya, K. A. S. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 136–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.63>
- Sodik & sioto. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*.

- Sugarda, Y. B. (2020). *Panduan praktis pelaksanaan focus group discussion sebagai metode riset kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tuharea, F. (2015). Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dengan nelayan kecil di Kabupaten Nabire. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 5(2).
- Wasiaturrahma, W., Sulistyowati, C., Heriyati, D., & Ajija, S. R. (2020). Peningkatan Kinerja Koperasi Melalui Pendampingan Manajemen Keuangan Pada Koperasi 64 Bahari Surabaya. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(1), 256–267. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jbm.v2i1.354>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
